

ANALISIS PENERAPAN SAP NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PSAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sumardi¹⁾, Nuuridha Matiin²⁾, Juwita Aprillia³⁾
mardisumardi18@gmail.com¹⁾, nuridha.frs@gmail.com²⁾, juwita.aprilia@gmail.com³⁾
¹²³⁾ Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara, Sangatta
¹²³⁾ Jl. Margo Santoso Dalam Sangatta Utara¹⁾

Abstract

The presentation of financial statements is carried out on Balitbang Kutim there is no empirical research to see the suitability applied in the agency based on SAP Number 1 of 2016 and PSAK Number 1 of 2013. This study objective is to find out how SAP Number 1 of 2016 and PSAK Number 1 of 2013 are implemented on the Office of the Research and Development Agency of East Kutai in presenting their financial statements for the period 2015 to 2019. This research uses a qualitative descriptive approach, namely by describing or describing the financial that has been collected as is the application of Government Accounting Standards (SAP) Number 1 of 2016 and PSAK Number 1 of 2013 concerning the presentation of financial statements.

Keyword: *SAP, PSAK, Presentation of Financial Statements, Region*

Abstrak

Penyajian laporan keuangan dilakukan oleh Balitbang Kutim belum ada penelitian secara empirik untuk melihat kesesuaian yang diterapkan di instansi tersebut berdasarkan SAP Nomor 1 tahun 2016 dan PSAK Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SAP Nomor 1 Tahun 2016 dan PSAK Nomor 1 Tahun 2013 diimplementasikan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kutai Timur dalam penyajian laporan keuangannya periode Tahun 2015 s/d 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 1 Tahun 2016 dan PSAK Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim tahun 2015-2019 secara umum sudah sesuai pada laporan operasional dan neraca sedangkan pada laporan realisasi anggaran masih rendah kesesuaiannya berdasarkan SAP Nomor 1 tahun 2016. Sedangkan Penerapan PSAK Nomor 1 tahun 2013 kesesuaiannya masih rendah baik pada neraca maupun pada laporan laba rugi kompeherensif.

Kata Kunci : *SAP, PSAK, Penyajian Laporan Keuangan, Daerah*

PENDAHULUAN

Menurut Harahap (2013 : 105) laporan keuangan merupakan laporan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa SAP merupakan standar yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pada sektor Pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah.

Selain itu, PSAK juga merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi.

Instansi Pemerintahan baik dari pusat maupun daerah diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan Pemerintah yaitu SAP Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyajian



laporan keuangan. Kemudian pembuatan laporan keuangan sektor Pemerintah dan swasta memiliki persamaan dalam pencatatan berbasis akrual, hal ini bisa dapat digunakan PSAK Nomor 1 Tahun 2013 di sektor Pemerintahan maupun sektor swasta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur telah membuat laporan keuangan, namun belum ada penelitian secara empiris untuk melihat kesesuaian di instansi tersebut Terhadap SAP Nomor 1 tahun 2016 maupun PSAK Nomor 1 tahun 2013.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SAP Nomor 1 Tahun 2016 dan PSAK Nomor 1 Tahun 2013 diimplementasikan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kutai Timur dalam penyajian laporan keuangannya periode Tahun 2015 s/d 2019.

Kerangka Dasar Teori

Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 pasal 1 nomor 3 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).

Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013 :105) laporan keuangan merupakan laporan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Kemudian menurut Menurut Kasmir (2010: 7) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi perusahaan yang di berikan kepada *stakeholders* untuk membuat keputusan dalam menejerial maupun investasi.

Komponen laporan keuangan

Kartomo (2019: 8) mengatakan bahwa Informasi Keuangan adalah data-data keuangan yang tersaji dalam bentuk deskripsi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas (*Cashflow*).



Menurut ikatan akuntansi indonesia dalam standar akuntansi keuangan (2013) Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari :Laporan Posisi Keuangan atau Neraca : mencakup beberapa komponen Aset tetap, Properti investasi; Aset tidak berwujud;

- 1) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada
- 2) investasi, piutang dagang, kas dan setara kas, Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, Persediaan; Piutang dagang dan piutang lainnya; Kas dan setara kas; Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual; Utang dagang dan terutang lainnya; Provisi; Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam utang dagang dan provisi); Liabilitas dan aset untuk pajak kini, Liabilitas dan aset pajak tangguhan, Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual; Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk.
- 3) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kompeherensif memiliki beberapa komponen, yaitu Pendapatan, Biaya keuangan, Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, Laba rugi sebelum pajak, Beban pajak, Laba rugi setelah pajak, penghasilan kompeherensif lain, Total laba rugi kompeherensif

Berdasarkan SAP Nomor 1 tahun 2016 bahwa ada beberapa pos-pos minimal yang wajib dimasukkan kedalam laporan keuangan, sebagai berikut:.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Didalam laporan realisasi anggaran menyajikan pos-pos paling sedikit meliputi: Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit LRA, Pembiayaan, dan Sisa/lebih kurang pembiayaan
- 2) Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pada laporan operasional menyajikan pos-pos paling sedikit, antara lain: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Pos luar biasa, dan Surplus/defisit-LO
- 3) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada neraca menyajikan pos-pos yang wajib dicatat didalam laporan keuangan, antara lain: Aset lancar (Kas dan Setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan), Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana cadangan, Aset lainnya, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas



Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hans (2016 : 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut komite standar akuntansi Pemerintahan dalam standar akuntansi Pemerintah tahun (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 1 Tahun 2016 dan PSAK Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan pada entitas untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada sehingga mampu memberikan informasi dan kesimpulan.

Objek pada penelitian ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Kutai Timur. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu laporan keuangan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019. Dengan jenis sumber data merupakan jenis data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel.4
Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Litbang Terhadap SAP Nomor 1 Tahun 2016

No	Jenis Laporan	Laporan Keuangan Balitbang Kutim Ta.2019	SAP Nomor 1 Tahun 2016	Kesesuaian
1	Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan Pos Belanja, surplus/defisit LRA, sisa/lebih kurang pembiayaan	Menyajikan pos paling sedikit Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit LRA, Pembiayaan, Sisa/lebih kurang pembiayaan	50%
2	Laporan Operasional	Menyajikan pos Pendapatan-LO. Beban Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional Pos Luar Biasa, Surplus/defisit-LO	laporan operasional menyajikan pos-Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO.	100%

Sumber:Data diolah 2021



3	Neraca	Menyajikan pos-pos Aset lancar (Kas dan Setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan) Investasi jangka Panjang, Aset Tetap , Dana Cadangan, Aset Lainnya, Kewajiban jangka pendek, Ekuitas	Neraca menyajikan pos-pos sebagai berikut: Aset lancar (Kas dan Setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan), Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana cadangan, Aset lainnya, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas	87,5%
---	--------	---	---	-------



Pada hasil tabel 4 menunjukkan bahwa penerapan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Balitbang Kutim sudah sesuai 50% dengan SAP Nomor 1 tahun 2016.

laporan operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai 100% dengan SAP nomor 1 tahun 2016.

Terakhir, laporan neraca Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai 87,5% dengan SAP nomor 1 tahun 2016.

Tabel 5.
Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Litbang Terhadap PSAK Nomor 1 Tahun 2013

No	Jenis Laporan	Laporan Keuangan Balitbang Kutim	PSAK Nomor 1 tahun 2013	Kesesuaian
1	Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan pos-pos sebagai berikut Pendapatan-LO, Beban (lebih rinci pada LRA, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa, Surplus/defisit-LO	Laporan Laba rugi dan penghasilan kompeherensif lain mencakup pos-pos, antara lain: Pendapatan, biaya keuangan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, laba rugi sebelum pajak, beban pajak, laba rugi setelah pajak, penghasilan, kompeherensif lain, total laba rugi kompeherensif.	42,85%
2	Neraca	Menyajikan pos sebagai berikut: Aset lancar (Kas dan setara kas, Investasi Jangka pendek, piutang dan penyisihan piutang, persediaan) Investasi jangka Panjang Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset tak berwujud, Aset Lainnya, Kewajiban jangka	Menyajikan pos-pos paling sedikit meliputi: Aset tetap, Properti investasi; Aset tidak berwujud; Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada investasi, piutang dagang, kas dan setara kas Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, Persediaan; Piutang dagang dan piutang lainnya, Kas dan setara kas; Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, Utang dagang dan terutang lainnya, Provisi; Liabilitas keuangan, Liabilitas dan aset,	27,78%

Sumber: Data diolah 2021

Pada 5. menunjukkan bahwa laporan operasional dan realisasi anggaran terhadap laporan laba rugi dan penghasilan kompeherensif berdasarkan PSAK nomor 1 tahun 2013 sudah sesuai 42,85%.

laporan neraca yang disajikan oleh Balitbang Kutim terhadap PSAK Nomor 1 Tahun 2013 sudah sesuai 27,78%.

Pembahasan

Penerapan penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim terhadap SAP Nomor 1 Tahun 2016

Laporan realisasi anggaran

Penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan realisasi anggaran menyajikan pos yang pertama adalah pos belanja. Pada penyajian tersebut telah menerapkan belanja yang di klasifikasikan



menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi tersebut memuat belanja pegawai yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS yang ada di instansi tersebut, kemudian belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk membayar kegiatan yang dilakukan instansi pada periode tersebut. Setelah itu, belanja modal yang memuat belanja peralatan dan mesin untuk pengadaan alat rumah tangga. Selanjutnya setelah pos belanja, laporan realisasi anggaran juga memuat surplus dan defisit LRA dan sisa lebih/kurang pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan masih belum mencatat pos-pos yang wajib dicantumkan berdasarkan SAP Nomor 1 tahun 2016, pertama belum mencatat pos pendapatan LRA yang memuat pendapatan Asli daerah, pendapatan transfer dana perimbangan, transfer pusat lainnya, transfer Pemerintah provinsi, dan pendapatan lainnya. Kedua, belum mencatat pos transfer yang memuat transfer/ bagi hasil ke desa. Terakhir, pada laporan realisasi anggaran belum mencatat pos pembiayaan yang memuat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Perlu memasukkan pos-pos wajib pada laporan realisasi anggaran meskipun tidak ada transaksi pada periode tersebut.

Laporan operasional

Penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan realisasi anggaran menyajikan pos yang pertama adalah pendapatan LO. Pada pos pendapatan LO memuat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian laporan operasional mencatat pos beban yang memuat Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Beban Tidak Terduga, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus. Setelah itu, laporan operasional mencatat surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non tradisional, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO.

Neraca

Penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan neraca menyajikan pos-pos, yaitu Aset lancar, Investasi jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset tak berwujud, Aset Lainnya, Kewajiban jangka pendek dan Ekuitas. Pada pos pertama aset lancar didalamnya terdapat 4 pos yang harus wajib dimasukkan berdasarkan SAP Nomor 1 Tahun 2016, yaitu Kas dan setara kas, Investasi Jangka pendek, piutang dan penyisihan piutang, persediaan. Karena pos-pos tersebut diklasifikasikan pemakaiannya kurang dari 12 bulan, maka dimasukkan ke dalam pos aset lancar. Selanjutnya, laporan neraca Balitbang Kutim menyajikan pos Investasi jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset tak berwujud, Aset Lainnya,



Kewajiban jangka pendek dan Ekuitas. Namun, pada pos kewajiban jangka panjang tidak disajikan pada laporan tersebut.

Penerapan penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim terhadap PSAK Nomor 1 Tahun 2016.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional terhadap Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kompeherensif.

Penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan operasional menyajikan pos-pos, yaitu Pendapatan-LO, Beban, Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit-LO. Kemudian untuk pos beban lebih di rincikan pada laporan realisasi anggaran. Pada pos pendapatan sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 tahun 2013 karena mencakup seluruh pemasukan yang di terima. Kemudian pada pos beban yang lebih dirincikan pada laporan realisasi anggaran telah sesuai PSAK Nomor 1 tahun 2013 pada laporan neraca ada pos beban yang dimana mencatat seluruh pengeluaran operasional dan non operasional. Kemudian pada pos surplus/defisit sesuai dengan pos laba/rugi sebelum pajak karena pada laporan badan penelitian tidak ada pos pengurangan beban pajak, sehingga peneliti mengambil pos laba/rugi sebelum pajak. Pada pos-pos seperti Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan Pos Luar Biasa tidak terdapat kesesuaian dengan pos-pos yang ada pada laporan laba rugi dan penghasilan kompeherensif.

Laporan Neraca.

Penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan neraca menyajikan pos-pos, yaitu Aset lancar, Investasi jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset tak berwujud, Aset Lainnya, Kewajiban jangka pendek, dan Ekuitas. Pada pos aset lancar memuat beberapa pos didalamnya yaitu Kas dan setara kas, Investasi Jangka pendek, piutang dan penyisihan piutang, persediaan dikarenakan penggunaannya yang kurang dari 12 bulan sehingga masuk ke dalam pos aset lancar. Kemudian pos-pos tersebut sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 tahun 2013 yang dimana wajib memuat Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, Persediaan, Piutang dagang dan piutang lainnya, dan Kas dan setara kas. Kemudian pada pos investasi jangka panjang juga termasuk sesuai pos investasi dengan metode ekuitas. Selanjutnya pada pos aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 tahun 2013 yang meliputi aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya. Setelah itu, pada pos dana cadangan tidak ada kesesuaian pada PSAK Nomor 1 tahun 2013. Terakhir, pada pos kewajiban jangka pendek dan ekuitas ini masih mencakup secara umum, sedangkan pada PSAK Nomor 1 tahun 2013 membahas klasifikasi kewajiban dan ekuitas sangat terinci, maka tidak ada kesesuaian antara pos-pos tersebut meskipun jenis pos tersebut sama.

Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Sebagai Berikut



- 1) Penerapan SAP Nomor 1 tahun 2016 pada penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim secara umum sudah sesuai pada laporan operasional dan neraca sedangkan pada laporan realisasi anggaran masih rendah kesesuaiannya.
- 2) Penerapan PSAK Nomor 1 tahun 2013 pada penyajian laporan keuangan Balitbang Kutim pada laporan operasional dan realisasi anggaran terhadap laporan laba rugi dan penghasilan kompeherensif dan neraca kesesuaiannya masih rendah
saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:
 - 1) Perlunya perbaikan penyajian laporan keuangan pada neraca dan laporan realisasi anggaran wajib memasukkan pos pendapatan dan pembiayaan.

Perlunya perbaikan pada penyajian laporan keuangan disesuaikan berdasarkan PSAK 1 Tahun 2013 yang pos-pos tersebut lebih dirincikan

DAFTAR PUSTAKA

- Hans, Kartikahadi. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis. IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Revisi 2013.
- Kartomo. La Sudarman. 2019. Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

